Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2025. Vol. 6, No. 1. Page 167-172
https://doi.org/10.52103/jahr.v6i1.1931
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Hubungan Birokrasi dengan Pencegahan HIV AIDS pada Pasien Poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba

Iriani Masjidi[1], *Andi Asrina[2], Andi Surahman Batara[2]

[1]*Dokter Gigi, Puskesmas Keera, Dinas Kabupaten Wajo*
[2]*Magister Program in Public Health, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia*

Article History
Received: 12 December 2024
Revised: 27 December 2024
Accepted: 02 January 2025

Keywords: Birokrasi; Pencegahan HIV AIDS; Poli Gigi

Corresponding Author:
E-mail:
andi.asrina@umi.ac.id
Address: BTP Blok B no.53 Makassar

Abstrak
Latar belakang: Dalam upaya pencegahannya, birokrasi memiliki peran penting sebagai penggerak kebijakan, penyedia layanan, dan koordinator program-program lintas sektor.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan birokrasi dengan pencegahan HIV AIDS pada pasien poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba tahun 2024.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional study* untuk menganalisis hubungan variabel berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah semua petugas kesehatan di Poli gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba sebanyak 55 orang. Teknik pengambilan sampel digunakan *purposive* sampling.
Hasil: Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil uji statistik dengan uji *chi-square* diperoleh berdasarkan komunikasi nilai p-value (0,003 < 0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak.
Kesimpulan: Terdapat hubungan birokrasi dengan pencegahan HIV AIDS pada Pasien Poli Gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba tahun 2024. Adapun saran agar petugas kesehatan dapat mengatasi tantangan birokrasi dengan lebih baik, meningkatkan efektivitas program pencegahan HIV/AIDS, serta memberikan layanan yang inklusif dan berkualitas tinggi.

Abstract
Background: In prevention efforts, bureaucracy has an important role as a policy driver, service provider, and coordinator of cross-sector programs.
Objective: This study aims to determine the relationship between bureaucracy and HIV AIDS prevention in Dental Polyclinics of Health Centers and Hospitals in Bulukumba Regency in 2024.
Method: This study uses a quantitative method with a cross-sectional study approach to analyze the relationship between variables based on data that has been collected through questionnaires, interviews, observations and documentation. The population of this study was all health workers in Dental Polyclinics of Health Centers and Hospitals in Bulukumba Regency totaling 55 people. The sampling technique used was purposive sampling.
Results: The results of the study obtained showed that the results of the statistical test with the chi-square test were obtained based on the communication of the p-value (0.003 <0.05) then Ha was accepted and H0 was rejected.
Conclusion: There is a relationship between bureaucracy and HIV AIDS prevention in Dental Polyclinics of Health Centers and Hospitals in Bulukumba Regency in 2024. The suggestions are for health workers to be able to overcome bureaucratic challenges better, increase the effectiveness of HIV/AIDS prevention programs, and provide inclusive and high-quality services.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

Pencegahan HIV/AIDS merupakan salah satu tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyakit ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam upaya pencegahannya, birokrasi memiliki peran penting sebagai penggerak kebijakan, penyedia layanan, dan koordinator program-program lintas sektor.

Secara global, 39,0 juta orang (33,1–45,7 juta) mengidap HIV pada akhir tahun 2023. Diperkirakan 0,7% (0,6–0,8%) orang dalam rentang usia 15–49 tahun positif HIV di seluruh dunia, namun persentase ini sangat bervariasi antarnegara dan wilayah geografis. Sekitar 1 dari 25 orang dewasa (3,2%) hidup dengan HIV dan mencakup lebih dari dua pertiga dari semua individu HIV-positif di seluruh dunia, benua Afrika terus menjadi yang paling parah terkena dampaknya (WHO 2024).

Menurut Kementerian Kesehatan RI, estimasi orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2022, estimasi orang dengan HIV di Indonesia mencapai 540 ribu kasus. Angka tersebut mengalami penurunan pada 2023 menjadi 515 ribu kasus.

Berdasarkan data statistik Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, perkembangan HIV/AIDS di Sulawesi Selatan meningkat pesat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 hingga 2022, kasus ini bertambah sebanyak 694 orang, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1.881 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2.575 kasus. Tercatat sebanyak 279 kasus AIDS dan 1.475 kasus HIV pada periode Januari hingga September 2023. Pada periode Januari 2024 hingga minggu ketiga April 2024, terdapat 140 orang yang terjangkit HIV-AIDS. Sebanyak 95 kasus di antaranya disebabkan oleh hubungan seksual sesama jenis. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2024.

Di antara tenaga medis yang berisiko karena kontak dekat dengan darah dan air liur pasien adalah dokter gigi dan ahli kesehatan gigi. Perlu dicatat bahwa dokter gigi sangat rentan terhadap gangguan infeksi parah yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Infeksi dapat menjadi masalah yang signifikan dalam kehidupan mereka saat melakukan prosedur di dalam mulut dan bersentuhan dengan darah, air liur, atau droplet di udara. Selama prosedur gigi, berbagai virus, termasuk Hepatitis B, HIV, Hepatitis C, HSV, dan lainnya, dapat ditularkan.

Tugas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pencegahan HIV/AIDS berada di tangan birokrasi, melalui berbagai departemen pemerintah. Mengembangkan kebijakan nasional merupakan tugas pertama dari beberapa tugas penting dalam pencegahan. Pemerintah, melalui kementerian atau lembaga terkait, bertugas mengembangkan kebijakan strategis untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Rencana pencegahan HIV/AIDS nasional, yang menargetkan populasi rentan, adalah salah satu contohnya.

Aspek pertama dalam birokrasi meliputi bekerja sesuai SOP yang ada dapat melindungi mereka dari bahaya-bahaya atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, dalam hal ini penularan HIV/AIDS. Aspek kedua, fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Hal ini sejalan dengan Penelitian (Istiqomah et al., 2020) Birokrasi dalam penanggulangan HIV/AIDS akan berjalan dengan baik apabila petugas kesehatan telah mengetahui SOP dan menjalankannya agar dapat meminimalisir kejadian penularan penyakit infeksi termasuk infeksi menular seksual seperti infeksi HIV AIDS.

Strategi yang dilakukan petugas kesehatan agar pasien HIV/AIDS mau memanfaatkan pelayanan VCT yang ada di Rumah Sakit adalah melakukan *Screening* pada semua pasien yang dirawat di Rumah sakit dengan mengajak pasien yang berisiko untuk ikut konseling secara privasi dan rahasia (Kurnia & Batara, 2019)

Meski berperan penting, birokrasi sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pencegahan HIV/AIDS, seperti Birokrasi yang kompleks dan lambat, Kurangnya koordinasi lintas sektor, Stigma dan diskriminasi, Keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dalam penelitian (Asrina, et al., 2023) Minimnya pengetahuan petugas kesehatan tentang pola penularan HIV dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hubungan birokrasi dengan pencegahan HIV AIDS pada pasien poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan birokrasi dengan pencegahan HIV AIDS pada pasien poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba tahun 2024.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

METODE

Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian *cross sectional study* untuk menganalisis hubungan variabel berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis hubungan implementasi kebijakan PERMENKES Nomor 23 Tahun 2022 tentang pencegahan HIV AIDS pada pasien Poli gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba. Populasi penelitian ini adalah semua petugas kesehatan di Poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Bulukumba sebanyak 55 orang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yang didasarkan pada kriteria yang ditentukan.

Definisi operasional dan pengukurannya

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen (birokrasi) dan variabel dependen (pencegahan HIV AIDS). Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner yang dibagikan. Kuesioner ini terdiri dari daftar pernyataan menggunakan skala likert dengan nilai 1 : sangat tidak setuju (STS), nilai 2 : tidak setuju (TS), nilai 3 : setuju (S), nilai 4 : sangat setuju (SS).

Analisis data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu hubungan komunikasi dengan pencegahan HIV AIDS pada pasien Poli gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba, maka hal tersebut akan dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Menyusun ke dalam pola sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian yang pada dasarnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase setiap variabel. Analisis univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi data sampel atau menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian. Pada analisis univariat menggunakan program statistik data komputer SPSS.

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis dua variabel yang mempunyai hubungan antar variabel dependen dan independen. Analisis ini dilakukan dengan membuat tabel (*contingency*) antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu untuk menganalisis ada tidaknya hubungan. Analisis bivariat adalah yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dengan menggunakan uji statistik yang digunakan adalah uji *Chi-Square*.

HASIL

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada 33 petugas Kesehatan tanpa pilot project, data terisi lengkap dan tidak terdapat data yang hilang ataupun tidak terbaca.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	n	%
Jenis Kelamin		
Perempuan	31	93,9
Laki-laki	2	6,1
Kelompok Umur		
27-39 Tahun	19	57,6
40-52 Tahun	9	27,3
14-26 Tahun	4	12,1
53-65 Tahun	1	3,0
Pendidikan Terakhir		
S1	24	72,7
DIII	4	12,1
DIV	4	12,1
S2	1	3,0

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Profesi		
Dokter Gigi	21	63,6
Terapis Gigi mulut	6	18,2
Perawat Gigi	4	12,1
Endodontis	1	3,0
Epidemiologi	1	3,0
Instansi		
Puskesmas	22	66,7
Rumah Sakit	11	33,3
Total	**33**	**100,0**

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin Perempuan sebanyak 31 orang (93,9%), kelompok umur terbanyak yaitu 27-39 tahun sebanyak 19 orang (57,6%), memiliki pendidikan terakhir terbanyak yaitu S1 sebanyak 24 orang (72,7), profesi mayoritas responden adalah dokter gigi sebanyak 21 orang (63,6%), dan instansi terbanyak yaitu Puskesmas sebanyak 22 orang (66,7%).

Analisis Univariat

Berikut ini adalah distribusi responden berdasarkan komunikasi pada petugas kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Birokrasi pada Pasien Poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Struktur Birokrasi	n	%
Kurang	13	39,4
Sesuai	20	60,6
Total	**33**	**100,0**

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan birokrasi telah sesuai yaitu sebanyak 20 orang (60,6%), sedangkan birokrasi yang masih kurang sebanyak 13 orang (39,4%).

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pencegahan HIV AIDS pada Pasien Poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Pencegahan HIV AIDS	n	%
Kurang	12	36,4
Cukup	21	63,6
Total	**33**	**100,0**

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pencegahan yang cukup yaitu sebanyak 21 orang (63,6%), sedangkan pencegahan HIV AIDS kurang sebanyak 12 orang (36,4%).

Analisis Bivariat

Tabel 4. Hubungan Birokrasi dengan Pencegahan HIV AIDS pada Pasien Poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Birokrasi	Pencegahan HIV AIDS				Total		p-value
	Kurang		Cukup				
	n	%	n	%	N	%	
Kurang	9	69,2	4	30,8	13	100,0	
Sesuai	3	15,0	17	85,0	20	100,0	0,003
Total	**12**	**36,4**	**21**	**63,6**	**33**	**100,0**	

Sumber : Data Primer, 2024

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 33 petugas kesehatan yang diteliti, jumlah petugas dengan struktur birokrasi kurang dengan pencegahan HIV AIDS kurang sebanyak 9 orang (69,2%), sedangkan jumlah petugas dengan struktur birokrasi kurang namun pencegahan HIV AIDS cukup sebanyak 4 orang (30,8%). Jumlah petugas dengan struktur birokrasi sesuai namun pencegahan kurang sebanyak 3 orang (15,0%), sedangkan jumlah petugas dengan struktur birokrasi sesuai dan pencegahan HIV AIDS cukup sebanyak 17 orang (85,0%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji *chi-square* diperoleh nilai *p-value* 0,003 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 27,3% struktur birokrasi kurang dengan pencegahan kurang. Hal ini dikarenakan tindakan petugas Poli kurang sesuai dengan tupoksi yang ada sehingga pencegahan yang dilakukan kurang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jaya et al., 2020) bahwa program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Malunda, berdasarkan hasil perencanaan tujuan sudah cukup baik, seperti dalam memberikan pelayanan, upaya meningkatkan hidup bersih dan sehat masyarakat. Walaupun dalam hal kuantitas masih menjadi kendala. Hal ini didukung teori (Wahjono, 2022) yang mengemukakan bahwa struktur organisasi di rumah sakit/puskesmas adalah komponen penting dalam mengelola pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pula 13,3% petugas Poli gigi dengan struktur birokrasi kurang namun pencegahan baik, hal ini dikarenakan ketidaktahuan petugas Poli tentang PERMENKES No. 23 tahun 2022 pasal 20 ayat 1 bahwa penerapan kewaspadaan standar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun terdapat seksi/pembagian tugas dalam pencegahan HIV AIDS. Dalam penelitian (Suar, 2023) menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa turut berpartisipasi untuk mewujudkan negara kesejahteraan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat inklusif bagi semua kalangan. Namun, dalam praktiknya Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa menyertakan aspek hierarki pada pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien. Struktur organisasi berdasarkan hirarki (organizational structure by hierarchy) atau secara singkat, struktur hirarki adalah pengaturan organisasi di mana perusahaan memiliki rantai komando yang panjang. Perusahaan memiliki banyak manajer menengah, yang mana menjembatani manajemen tingkat atas hingga karyawan. Itu adalah model tradisional untuk merepresentasikan struktur organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 51,5% struktur birokrasi sesuai dengan pencegahan baik. Hal ini dikarenakan instansi mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi kebijakan program P2 HIV AIDS dan PIMS sehingga pencegahan HIV AIDS dapat berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan kebijakan yang kompleks diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan dapat mengatur kerja sama orang-orang atau sumber daya di dalamnya secara efektif, dalam program Ini alur birokrasinya bersifat top-down mulai dari kementerian sampai tingkat puskesmas (Pujosiswanto et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Istiqomah et al., 2020) bahwa struktur birokrasi diperlukan untuk mengatur sumber daya atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Dalam penelitian (Insiyah & Indrawati, 2021) mengemukakan bahwa penentuan birokrasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi. Untuk meningkatkan pengalaman biasanya beberapa pegawai dilakukan rolling.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pula 9,1% dengan struktur birokrasi baik namun pencegahan kurang, hal ini dikarenakan pelaksanaan Kebijakan Program P2 HIV AIDS dan PIMS pada instansi berjalan dengan baik namun belum mengetahui isi dari PERMENKES No. 23 tahun 2022 pasal 20 ayat 1 bahwa penerapan kewaspadaan standar yang ditujukan untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan, serta masyarakat dan lingkungan dari cairan tubuh dan zat tubuh yang terinfeksi yang dilaksanakan sehingga pencegahan HIV AIDS kurang. Fragmentasi yaitu menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing (Maulidia, 2017). Hal ini didukung dalam penelitian (Insiyah & Indrawati, 2021) bahwa adanya pembagian pekerjaan, orang-orang akan melaksanakan pekerjaan tertentu, sehingga mereka tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dan mendatangkan produktivitas yang tinggi.

PERMENKES Nomor 23 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek terkait sumber daya di bidang kesehatan, termasuk tata kelola struktur birokrasi yang mendukung pengelolaan sumber daya kesehatan secara efisien.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PERMENKES menekankan pentingnya penguatan struktur birokrasi melalui digitalisasi yaitu Implementasi sistem informasi kesehatan nasional (SIKNas) untuk memudahkan koordinasi dan pelatihan pegawai untuk peningkatan kapasitas aparatur birokrasi kesehatan untuk mendukung kebijakan berbasis teknologi dan inovasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara struktur birokrasi dengan pencegahan HIV AIDS pada pasien Poli gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba.

Dalam penelitian (Aditya & Raharjo, 2021) menunjukkan bahwa Standard Operational Procedure (SOP) Program Posyandu Lansia di Wilayah Puskesmas Srondol yang sudah ada dan secara garis besar sudah terlaksana sesuai SOP. Pembagian tugas pelaksana Posyandu Lansia tidak begitu jelas dikarenakan prinsip kader untuk saling membantu dan mengisi tugas yang diberikan, jadi tidak terlihat perbedaan yang mendasar antara ketua Kader dan Anggota. Namun pembagian tugas Pelaksana Posyandu Lansia di Puskemas Srondol sudah jelas berdasarkan struktur organisasi di Puskesmas.

Namun berbeda dengan penelitian (Pujosiswanto et al., 2020), mengenai pernyataan tentang struktur birokrasi dalam hal ini koordinasi berjenjang ditemukan bahwa belum berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan birokrasi dengan Pencegahan HIV AIDS pada Pasien Poli Gigi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini agar penelitian mengenai birokrasi dalam pencegahan HIV/AIDS lebih komprehensif dan memberikan dampak nyata seperti menggunakan data kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman petugas kesehatan dan penerima layanan dalam menghadapi sistem birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Asrina, A., Ikhtiar, M., Idris, F. P., Adam, A., & Alim, A. (2023). Community stigma and discrimination against the incidence of HIV and AIDS. *Journal of Medicine and Life*, *16*(9), 1327–1334. https://doi.org/10.25122/jml-2023-0171

Istiqomah, A., Ilmu Kesehatan Masyarakat, J., Ilmu Keolahragaan, F., & Negeri Semarang, U. (2020). *705 HIGEIA 4 (Special 4) (2020) Higeia Journal Of Public Health Research And Development Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS*. https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%204/35108

Jaya, Z., Hannan, S., & Khalik, A. (2020). Analsis Pengembangan Kapasitas Struktur Organisasi Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Malunda. *Journal Peqguruang: Conference Series*, *2*(1), 274. https://doi.org/10.35329/jp.v2i1.1595

Kurnia, K. R., & Surahman, B. A. (2019). Analisis Pemanfaatan Pelayanan Vct (Voluntary Conseling And Testing) Hiv/Aids Di Rsud Labuang Baji Kota Makassar. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* (Vol. 14).

Maulidia, F. M. (2017). Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Pkpr) (Studi Di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul) The Influence Of Bureaucraticstructure Toward Policy Implementation Of Health Services And Care For Adolescent (PKPR) Program. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mediahusada*, *6*(2), 183–192.

Pujosiswanto, K. H., Palutturi, S., Ishak, H., Pascasarja, P., Administrasi, D., Kesehatan, K., Masyarakat, K., Hasanuddin, U., Lingkungan, D. K., & Masyarakat, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar Factors That Affect The Implementation Of Healthy Indonesia Program Through Family Approach (PIS-PK) In Health Centers Of Polewali Mandar Regency. In *123 JKMM* (Vol. 3, Issue 1).

Putri Aditya, R., & Budi Raharjo, B. (2021). Implementasi Pelaksanaan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, *3*(1), 1–10.

Safaatul Insiyah, N., & Indrawati, F. (2021). Indonesian Journal of Public Health and Nutrition Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas Article Info. *IJPHN*, *1*(3), 371–380. https://doi.org/10.15294/ijphn.v1i3.46205

Suar, H. P. N. (2023). Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan dalam BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Militer (Studi: Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa). *Jurnal Kebijakan Kesehatan : JKKI*, *12*(1), 35–46.

Wahjono, S. I. (2022). *Manajemen Pengendalian di Rumah Sakit*.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license